

**KONFLIK ELIT POLITIK LOKAL
STUDI KASUS PEMBERHENTIAN WALIKOTA
BAMBANG DH OLEH DPRD KOTA SURABAYA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH

ANANG HERRY PURWANTO

079916045

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GASAL 2003/2004**

**KONFLIK ELIT POLITIK LOKAL
STUDI KASUS PEMBERHENTIAN WALIKOTA
BAMBANG DH OLEH DPRD KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik**



DISUSUN OLEH

ANANG HERRY PURWANTO

079916045

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GASAL 2003/2004**

Universitas Airlangga
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Program Studi Ilmu Politik
Surabaya, 2003

ABSTRAK

Nama : Anang Herry Purwanto
NIM : 079916045
Judul : Konflik Elit politik Lokal Studi Kasus Pemberhentian Walikota Bambang DH Oleh DPRD Kota Surabaya
Kepustakaan : Literatur (Th 1984-2001), Textbook 23 eksemplar, Jurnal 1 eksemplar, Surat Kabar 9 eksemplar.
Jumlah Hal :Halaman (Lembar Persetujuan 1 hal, Pengesahan dan Persembahan 2 hal, Abstrak 2 hal, kata Pengantar 2 hal, Daftar Isi 3 hal, Daftar Tabel 1 hal, Isi 128 hal, Daftar Pustaka 3 hal, lampiran 7 hal)

Seiring dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999, sistem politik di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu dari sentralisasi menuju desentralisasi. Daerah yang dulu sangat tergantung kepada pusat, sekarang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Kondisi ini berdampak terhadap menguatnya posisi legislatif bila dibandingkan dengan eksekutif, karena legislatif diberi wewenang untuk memilih Walikota/Bupati dan mengusulkan untuk memberhentikan Walikota/Bupati sekaligus mengontrol kinerjanya. Tetapi wewenang yang didapat oleh legislatif tidak diikuti dengan kemampuan yang memadai, sehingga keputusan yang diambil oleh legislatif sering memancing terjadinya konflik, khususnya konflik yang berkaitan dengan penolakan LPJ Walikota/Bupati. Oleh sebab itu penelitian ini sangat perlu dilakukan karena ujung tombak pembangunan nasional berada di daerah, pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik apabila pembangunan daerah juga berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menjawab permasalahan penelitian sebagai berikut: *Pertama*, Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dikeluarkan keputusan DPRD Kota Surabaya mengenai pemberhentian Bambang DH sebagai Walikota Surabaya. *Kedua*, Bagaimana struktur konflik elit politik lokal yang terjadi terkait dengan pemberhentian Bambang DH. *Ketiga*, Dampak politik apa yang muncul akibat dikeluarkan keputusan DPRD tersebut khususnya terhadap hubungan antara DPRD dengan Pemkot Surabaya pasca dikeluarkannya keputusan tentang pemberhentian Bambang DH sebagai Walikota Surabaya.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elit, konflik dan desentralisasi. Dalam penelitian ini menghasilkan temuan data sebagai berikut : *Pertama*, sebab-sebab konflik meliputi faktor LPJ, perbedaan penafsiran mengenai PP 108, konflik intern PDIP, penyebab konflik yang berasal dari FPKB. *Kedua*, Dampak konflik terhadap perubahan struktur di DPRD Kota Surabaya,

dampak konflik terhadap hubungan legislative dan eksekutif. *Ketiga*, Struktur terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik.

Dari Penelitian ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya politik tidak dipahami oleh para elit untuk mewujudkan kebaikan bersama dan untuk mencapai kesejahteraan, tetapi politik hanya dipahami sebagai usaha untuk memperebutkan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik diantara para elit.

